

STRATEGI MARITIME SILK ROAD CHINA DAN PROSES SEKURITISASI KEAMANAN MARITIM FILIPINA (2018–2023)

Raden Maisa¹, Darryl Enrizki^{1*}, Fajar Ajie Setiawan¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

*Corresponding email: darryl.enrizki@gmail.com

Abstract

The Maritime Silk Road (MSR), as part of the Belt and Road Initiative (BRI), has become a key instrument for China to expand its influence in Southeast Asia, including the Philippines. Beyond being an economic project, MSR also serves as a maritime expansion strategy, where the development of ports and logistics infrastructure has dual-use potential, benefiting both economic and geopolitical interests. Securitization theory explains how this initiative strengthens China's territorial claims in the South China Sea, supported by the presence of the China Coast Guard (CCG) and maritime militias, which employ gray zone tactics to exert control over disputed waters without direct military confrontation. The Regional Security Complex (RSC) theory illustrates how the Philippines' policy toward MSR has shifted under two different administrations. Rodrigo Duterte (2016–2022) adopted a more accommodative approach, accepting MSR investments to drive economic growth and infrastructure development, while Bongbong Marcos (2022–2023) took a firmer stance by reassessing the Philippines' participation due to escalating CCG activities in disputed areas. MSR is not merely an economic initiative but also a securitization and geopolitical expansion tool for China, creating a dilemma for the Philippines between economic benefits and threats to its maritime sovereignty, with significant implications for regional security dynamics in Southeast Asia.

Keywords: *Maritime Silk Road, Securitization, Maritime Expansion, Regional Security Complex, Maritime Security*

Abstrak

Maritime Silk Road (MSR) sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI) merupakan instrumen utama dalam memperluas pengaruh China di Asia Tenggara, termasuk Filipina. Selain sebagai proyek ekonomi, MSR juga berfungsi sebagai strategi ekspansi maritim, di mana pembangunan pelabuhan dan infrastruktur logistik memiliki fungsi ganda (dual-use) yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan geopolitik. Teori sekuritisasi menjelaskan bagaimana inisiatif ini memperkuat klaim teritorial China di Laut China Selatan, didukung oleh kehadiran China Coast Guard (CCG) dan milisi maritim yang menerapkan taktik gray zone untuk mengendalikan wilayah sengketa tanpa konfrontasi militer langsung. Teori Regional Security Complex (RSC) menggambarkan bagaimana kebijakan Filipina terhadap MSR mengalami perubahan di bawah dua pemerintahan berbeda. Rodrigo Duterte (2016–2022) lebih akomodatif, menerima investasi MSR demi kepentingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sementara Bongbong Marcos (2022–2023) mengambil sikap yang lebih tegas dengan meninjau ulang partisipasi Filipina akibat meningkatnya aktivitas CCG di wilayah sengketa. MSR bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga alat sekuritisasi dan ekspansi geopolitik China, yang menciptakan dilema bagi Filipina antara manfaat ekonomi dan ancaman terhadap kedaulatan maritimnya, serta berdampak signifikan terhadap dinamika keamanan kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci: *Maritime Silk Road, Sekuritisasi, Ekspansi Maritim, Regional Security Complex, Keamanan Maritim*

PENDAHULUAN

Belt and Road Initiative (BRI) yang diinisiasi oleh China pada tahun 2013 merupakan proyek ambisius yang bertujuan meningkatkan konektivitas ekonomi global melalui pembangunan infrastruktur. Salah satu bagian utama dari *BRI* adalah *Maritime Silk Road (MSR)*, yang berfokus pada pengembangan jalur perdagangan maritim melalui investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan logistik di berbagai negara, termasuk Filipina (Chung, 2017). Dalam konteks Filipina, interaksi kebijakan *MSR* menimbulkan berbagai dilema keamanan. Filipina berada dalam posisi strategis di kawasan Asia Tenggara dan memiliki sengketa teritorial yang berkepanjangan dengan China di Laut China Selatan. Investasi China dalam proyek-proyek pelabuhan dan infrastruktur maritim di Filipina memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi juga meningkatkan ketergantungan ekonomi Filipina terhadap China, yang dapat berdampak pada kebijakan luar negeri dan keamanan nasionalnya (De Castro, 2019).

Keterlibatan Filipina dalam proyek *MSR* tidak dapat dilepaskan dari konteks hubungan bilateral Filipina-China yang kompleks, terutama terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan. Sebagai negara yang memiliki klaim atas sebagian wilayah tersebut, Filipina menghadapi dilema antara mengejar keuntungan ekonomi dari investasi China dan mempertahankan kedaulatan atas wilayah maritimnya. Proyek pelabuhan, seperti yang dibangun di Davao dan Subic, menjadi simbol dari ambiguitas posisi Filipina terhadap ekspansi geopolitik China (Banlaoi, 2014).

Dalam praktiknya, proyek-proyek *MSR* tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga memunculkan perubahan dalam persepsi ancaman. Kehadiran kapal *China Coast Guard (CCG)* dan milisi maritim di sekitar perairan sengketa menimbulkan ketegangan yang semakin meningkat antara kedua negara. Bentuk ancaman ini sering kali tidak bersifat konvensional, melainkan menggunakan strategi *gray zone*, yaitu tindakan koersif yang berada di antara perang dan damai, untuk memperluas pengaruh China tanpa konfrontasi langsung (Mahendra, Ramadhoan, & Suhermanto, 2023).

Perubahan pendekatan kebijakan luar negeri Filipina juga menjadi indikator penting dalam melihat dinamika ini. Di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte (2016–2022), Filipina lebih terbuka terhadap investasi *MSR*, dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun, pada masa pemerintahan Bongbong Marcos (2022–2023), terjadi pergeseran sikap yang lebih berhati-hati dan bahkan konfrontatif terhadap kehadiran China di perairan yang disengketakan. Hal ini tercermin dalam berbagai insiden diplomatik, termasuk pengajuan nota protes dan peningkatan patroli maritim oleh angkatan laut Filipina (Heydarian, 2024).

Fenomena ini menunjukkan adanya kekosongan dalam studi hubungan internasional yang secara khusus mengkaji bagaimana proyek ekonomi lintas negara seperti *MSR* dapat mempengaruhi keamanan maritim suatu negara penerima, terutama di kawasan yang rawan konflik seperti Laut China Selatan. Meskipun terdapat sejumlah studi mengenai dampak ekonomi *BRI* (Johnston, 2018), masih sedikit yang membahas secara komprehensif kaitan

antara kebijakan investasi maritim China dan persepsi serta respon keamanan negara-negara mitra, khususnya Filipina. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mengintegrasikan dimensi ekonomi dan keamanan dalam memahami interaksi kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan *MSR* China mempengaruhi keamanan maritim Filipina pada periode 2018–2023. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk ancaman non-konvensional yang muncul sebagai konsekuensi dari keterlibatan Filipina dalam *MSR*, serta menilai dinamika perubahan kebijakan luar negeri Filipina dalam merespons perkembangan tersebut.

Penelitian ini mengisi celah dalam literatur hubungan internasional dengan menggabungkan analisis ekonomi-politik dan keamanan regional. Dalam kajian tradisional, sektor ekonomi dan keamanan sering kali dipisahkan secara analitis. Namun, melalui pendekatan integratif, studi ini berusaha menunjukkan bahwa proyek seperti *MSR* tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memicu dinamika keamanan baru yang perlu dipahami secara menyeluruh (Blackwill & Harris, 2016).

Struktur artikel ini disusun sebagai berikut: bagian kedua menguraikan kerangka teori yang digunakan, yaitu satu *grand theory*, satu *middle-range theory*, dan satu *applied theory* yang relevan dalam menjelaskan keterkaitan antara proyek *MSR* dan keamanan maritim. Bagian ketiga menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan kualitatif dan metode pengumpulan data. Bagian keempat menyajikan hasil temuan utama terkait interaksi kebijakan *MSR* terhadap keamanan maritim Filipina, dengan

fokus pada aspek ketergantungan ekonomi, kehadiran maritim China, dan perubahan kebijakan luar negeri Filipina. Akhirnya, bagian kelima menyimpulkan temuan utama dan implikasi teoritis yang dapat ditarik dari kasus ini.

KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan teoretis yang saling melengkapi untuk memahami bagaimana kebijakan *Maritime Silk Road (MSR)* China memengaruhi keamanan maritim Filipina dalam periode 2018–2023. Ketiga pendekatan tersebut mencakup *grand theory*, *middle-range theory*, dan *applied theory* yang berasal dari disiplin hubungan internasional dan relevan untuk menjelaskan keterkaitan antara proyek ekonomi lintas negara dan dinamika keamanan kawasan.

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *realisme struktural* atau *neorealisme*. Teori ini menekankan pentingnya struktur sistem internasional yang anarkis dalam menentukan perilaku negara. Dalam konteks ini, negara dipandang sebagai aktor utama yang berusaha mempertahankan kelangsungan hidup dan keamanan melalui peningkatan kapabilitas materialnya (Waltz, 1979). China, sebagai kekuatan besar yang tengah bangkit, memanfaatkan proyek *MSR* sebagai sarana untuk memperluas pengaruh politik dan militernya di kawasan. Dengan meningkatkan kontrol atas jalur perdagangan maritim strategis, China secara efektif memperkuat posisinya dalam struktur kekuatan internasional. Filipina, sebagai negara yang lebih kecil dalam sistem internasional, merespons tekanan struktural ini dengan kebijakan yang bersifat adaptif dan reflektif terhadap

kepentingan nasional dan tekanan eksternal.

Untuk menjembatani antara level sistem dan negara, penelitian ini menggunakan *Regional Security Complex Theory (RSCT)* sebagai *middle-range theory*. *RSCT* yang dikembangkan oleh Buzan dan Wæver (2003) menjelaskan bahwa keamanan internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan besar secara global, tetapi juga oleh dinamika regional yang khas. Asia Tenggara sebagai salah satu *regional complex* memiliki pola interaksi keamanan tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor geografis, sejarah, dan hubungan antarnegara di kawasan. Dalam konteks ini, keterlibatan China melalui proyek *MSR* telah mengubah konfigurasi keamanan kawasan, dengan menciptakan ketegangan baru antara negara-negara ASEAN, terutama Filipina, dan China. Perubahan sikap kebijakan Filipina di bawah pemerintahan Duterte dan Marcos dapat dipahami sebagai upaya untuk menavigasi dinamika *regional security complex* yang terus berkembang akibat tekanan eksternal dari China dan ketergantungan internal pada investasi.

Sementara itu, teori yang digunakan sebagai *applied theory* dalam penelitian ini adalah konsep *sekuritisasi* dari *Copenhagen School*. Teori ini berfokus pada bagaimana suatu isu dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial melalui tindakan wacana oleh aktor keamanan (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Dalam studi ini, proyek *MSR* diposisikan sebagai isu ekonomi yang kemudian disekuritisasi oleh aktor-aktor politik dan keamanan Filipina karena dampaknya terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Retorika pemerintah Filipina yang mengaitkan aktivitas *China Coast Guard* dan milisi maritim dengan pelanggaran atas batas

maritim nasional menunjukkan bahwa isu ekonomi dapat bergeser menjadi isu keamanan melalui proses sekuritisasi. Dengan demikian, penerapan teori sekuritisasi memungkinkan analisis terhadap dinamika perubahan persepsi ancaman di tingkat domestik dan kebijakan luar negeri yang diambil sebagai respons.

Keterpaduan antara *realisme struktural*, *RSCT*, dan *teori sekuritisasi* memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk menjelaskan hubungan antara proyek ekonomi transnasional dan dinamika keamanan negara mitra. *Realisme struktural* menjelaskan motif kekuatan besar, *RSCT* mengurai dinamika keamanan kawasan, sementara *teori sekuritisasi* memfasilitasi pemahaman terhadap perubahan persepsi ancaman dan respons kebijakan domestik. Ketiga teori ini saling melengkapi dalam menghubungkan level sistem, regional, dan negara dalam satu analisis utuh.

Pemilihan teori-teori ini juga didasarkan pada kesesuaian dengan fenomena empiris yang diamati serta validitas akademik dari masing-masing teori dalam studi hubungan internasional kontemporer. Dengan menggunakan kombinasi tiga level analisis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap dampak proyek *MSR* China terhadap keamanan maritim Filipina.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber akademik, termasuk jurnal, buku, dan laporan kebijakan. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam

terhadap kebijakan *MSR* China dan dampaknya terhadap keamanan maritim Filipina.

Metode kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi kompleksitas fenomena politik luar negeri dan keamanan maritim yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Sejalan dengan pendapat Creswell (2014), pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami makna, konteks, dan proses sosial-politik yang membentuk interaksi kebijakan internasional, khususnya dalam konteks dinamika hubungan Filipina dan China.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan kemudian menganalisis keterkaitannya dengan konstruksi teoritis. Deskripsi dalam penelitian ini mencakup aktivitas ekonomi-politik yang terkait dengan proyek *Maritime Silk Road* di Filipina, seperti pembangunan pelabuhan dan investasi strategis lainnya. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu *realisme struktural*, *Regional Security Complex Theory*, dan *sekuritisasi*. Masing-masing teori diterapkan untuk menguraikan dinamika yang terjadi pada level sistem internasional, kawasan, dan negara.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga kebijakan, dokumen pemerintah, pernyataan resmi dari kementerian luar negeri, serta laporan media yang kredibel. Penggunaan berbagai jenis sumber memungkinkan triangulasi data yang bertujuan untuk meningkatkan validitas informasi (Bowen, 2009). Misalnya, data mengenai aktivitas *China Coast Guard* di Laut China Selatan

diperoleh dari laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan media internasional seperti Bloomberg, sedangkan pernyataan kebijakan Filipina dikutip dari sumber resmi pemerintah dan pidato publik presiden.

Proses analisis data dilakukan melalui teknik *content analysis* yang bertujuan mengidentifikasi narasi, simbol, dan representasi yang muncul dalam wacana kebijakan luar negeri. Teknik ini relevan dengan penerapan teori sekuritisasi, di mana identifikasi konstruksi ancaman dilakukan melalui analisis bahasa dan tindakan politik (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998). Sebagai contoh, istilah seperti “ancaman terhadap kedaulatan” atau “intervensi asing” dianalisis sebagai bagian dari upaya sekuritisasi oleh aktor-aktor politik Filipina.

Kerangka kerja analisis dalam penelitian ini menggabungkan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan dalam penerapan teori untuk menganalisis kasus, sedangkan pendekatan induktif muncul dalam penggalian data dan interpretasi makna yang muncul dari teks atau dokumen. Dengan demikian, proses interpretasi tidak hanya terpaku pada skema teoritis, tetapi juga mempertimbangkan dinamika yang berkembang dari data empiris.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Filipina terhadap proyek *MSR* China pada periode 2018 hingga 2023. Fokus diletakkan pada sikap pemerintah di bawah Presiden Rodrigo Duterte dan Bongbong Marcos, serta respons terhadap aktivitas maritim China di Laut China Selatan. Dengan membatasi periode ini, penelitian dapat secara spesifik membandingkan perubahan kebijakan antar-pemerintahan dan

menjelaskan faktor yang memengaruhinya.

Dalam rangka meningkatkan keterlacakan (*traceability*) dan transparansi akademik, seluruh sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dicantumkan secara lengkap dalam *Daftar Pustaka* sesuai dengan format APA edisi ke-7. Validitas internal dijaga melalui pencocokan silang antara narasi kebijakan dan peristiwa empiris. Validitas eksternal diperkuat melalui penggunaan teori yang telah teruji dan relevan dalam studi hubungan internasional.

Peneliti juga menyadari keterbatasan metodologis dalam studi ini. Pertama, keterbatasan akses terhadap data primer, seperti wawancara dengan aktor kebijakan di Filipina, membuat studi ini bergantung sepenuhnya pada data sekunder. Kedua, kompleksitas hubungan internasional antara Filipina dan China tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui satu pendekatan saja. Oleh karena itu, pemilihan tiga teori dilakukan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif, meskipun tetap terbatas pada lingkup teoritis yang telah ditentukan.

Terakhir, proses analisis dan interpretasi dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi argumen dan kesesuaian antara data dan teori. Setiap temuan yang akan disajikan dalam bagian hasil penelitian akan dikaitkan secara eksplisit dengan kerangka teoritis dan konteks empiris yang relevan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap kajian hubungan internasional, khususnya mengenai pengaruh kebijakan ekonomi transnasional terhadap keamanan negara berkembang.

PEMBAHASAN

Ketergantungan Ekonomi dan Awal Proses Sekuritisasi

Kebijakan *Maritime Silk Road* (*MSR*) yang dijalankan oleh China merupakan bagian integral dari strategi ekspansi geopolitik yang tidak hanya berimplikasi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada dinamika keamanan maritim di Asia Tenggara. Bagi Filipina, yang secara geografis terletak di wilayah strategis Laut China Selatan dan memiliki sejarah panjang sengketa teritorial dengan China, keterlibatan dalam proyek *MSR* menimbulkan dilema yang signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan Filipina dalam *MSR* telah memunculkan dinamika baru dalam politik domestik, perubahan kebijakan luar negeri, dan intensifikasi sekuritisasi isu kedaulatan maritim.

Salah satu temuan utama adalah terjadinya proses *sekuritisasi* terhadap hubungan ekonomi antara Filipina dan China. Meskipun proyek *MSR* secara formal ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas regional, aktor-aktor domestik di Filipina mulai membingkai hubungan tersebut sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan nasional. Ketergantungan ekonomi terhadap investasi China, terutama dalam sektor pelabuhan dan jalur logistik, dilihat bukan hanya sebagai bentuk kerja sama pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen potensial untuk penetrasi politik dan pengaruh strategis oleh China. Hal ini diperkuat oleh minimnya transparansi dalam kontrak proyek dan dugaan bahwa proyek tersebut terhubung dengan kepentingan militer atau pengawasan China di wilayah sengketa (Johnston, 2018; Malik, 2017).

Proses *sekuritisasi* ini juga diperkuat oleh ketidakseimbangan posisi tawar. China sebagai pemberi dana dan teknologi memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah implementasi proyek. Filipina, di sisi lain, sering kali tidak memiliki kapasitas institusional atau politik untuk menegosiasikan syarat yang lebih menguntungkan. Ketimpangan ini menciptakan kondisi yang memungkinkan dominasi ekonomi berkembang menjadi instrumen kontrol politik tidak langsung. Hal ini sejalan dengan argumen Buzan, Wæver, dan de Wilde (1998) bahwa *sekuritisasi* tidak hanya muncul dari ancaman militer, tetapi juga dari bidang ekonomi dan politik, selama ada aktor yang berhasil memframing-nya sebagai isu keamanan.

Contoh konkret dapat dilihat dalam pembangunan proyek pelabuhan di Davao yang melibatkan perusahaan China Communications Construction Company (CCCC). Meski secara resmi bersifat ekonomi, proyek ini ditafsirkan sebagai upaya memperluas pengaruh logistik dan kontrol rute maritim strategis oleh China. Aktor politik di Filipina, termasuk legislator oposisi dan kelompok masyarakat sipil, mulai mengangkat isu ini dalam forum-forum nasional dengan menyatakan bahwa proyek seperti ini dapat digunakan sebagai “*trojan horse*” untuk memperlemah posisi maritim Filipina (Jose, 2021).

Kekhawatiran atas “jebakan utang” juga memperkuat narasi *sekuritisasi*. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, beberapa negara penerima proyek *MSR* mengalami beban pembayaran utang yang berujung pada hilangnya kendali atas aset strategis, seperti yang terjadi dalam kasus pelabuhan Hambantota di Sri Lanka (Hurley, Morris, & Portelance, 2018). Meskipun Filipina belum mengalami

kasus sejenis secara langsung, analogi ini kerap digunakan oleh aktor-aktor domestik untuk memperkuat klaim bahwa ketergantungan finansial terhadap China dapat membahayakan kedaulatan ekonomi dan politik negara.

Militerisasi Halus: Kehadiran CCG dan Milisi Maritim

Proses *sekuritisasi* semakin menguat seiring dengan meningkatnya kehadiran fisik *China Coast Guard* (CCG) dan milisi maritim di wilayah maritim yang diklaim Filipina. Kehadiran CCG tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga operasional, melalui patroli rutin, penghalangan akses, dan bahkan insiden penggunaan laser militer terhadap kapal Filipina. Tindakan-tindakan ini tidak hanya memperumit dinamika bilateral, tetapi juga secara aktif membentuk persepsi ancaman di dalam negeri Filipina. Aktor politik, media, dan organisasi masyarakat sipil mulai menggunakan istilah seperti “agresi maritim,” “provokasi,” dan “intervensi asing” untuk menggambarkan aktivitas CCG, yang memperkuat narasi bahwa China tidak hanya merupakan mitra ekonomi, tetapi juga ancaman keamanan langsung (Banlaoi, 2014; Clark, 2023).

Salah satu insiden paling menonjol terjadi pada Februari 2023, ketika kapal CCG menggunakan laser militer terhadap kapal penjaga pantai Filipina. Insiden ini memicu reaksi keras dari publik, media, dan pejabat tinggi Filipina yang menafsirkan tindakan tersebut sebagai provokasi serius terhadap kedaulatan nasional. Peristiwa ini menjadi momen penting dalam eskalasi wacana *sekuritisasi*, di mana aktor negara dan non-negara mulai menuntut respons lebih keras terhadap aktivitas China.

Kehadiran milisi maritim menambah kompleksitas. Kelompok ini

sering beroperasi tanpa tanda atau identitas resmi, namun jelas melakukan kegiatan atas dasar dukungan atau pembiaran dari otoritas China. Tindakan mereka mencakup intimidasi terhadap kapal nelayan Filipina, sabotase alat tangkap, dan pengawasan ilegal (Hoque & Tama, 2020). Ketidakjelasan status milisi maritim membuat mereka menjadi alat strategis dalam memperluas pengaruh tanpa menanggung risiko konfrontasi langsung. Dalam praktiknya, strategi ini menggambarkan pendekatan *smart power*, di mana instrumen non-militer digunakan untuk mencapai tujuan politik dengan cara yang lebih terselubung (Nye, 2004).

Filipina bukan satu-satunya negara ASEAN yang menghadapi taktik serupa. Vietnam juga mengalami insiden penekanan di perairan yang diklaim, dengan pola kehadiran CCG dan milisi yang hampir identik. Namun, respons kebijakan Filipina tampak lebih dinamis karena dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti rotasi kepemimpinan politik dan tekanan dari masyarakat sipil. Perbandingan ini menunjukkan bahwa proses *sekuritisasi* tidak semata ditentukan oleh ancaman objektif, tetapi juga oleh bagaimana ancaman tersebut dikonstruksikan dan diterima oleh audiens politik dalam negeri (Vu, 2020).

Perubahan Wacana dan Kebijakan Luar Negeri Filipina

Perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Filipina terlihat selama periode 2018–2023. Di bawah pemerintahan Rodrigo Duterte, pendekatan Filipina terhadap China cenderung akomodatif. Duterte memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, serta memilih untuk meredam ketegangan di Laut China Selatan demi menjaga arus investasi dari China. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya diterima oleh

semua pihak di dalam negeri. Munculnya kritik dari kalangan oposisi, militer, dan masyarakat sipil terhadap sikap pasif pemerintah dalam menghadapi pelanggaran maritim oleh China menunjukkan bahwa isu ini telah bergeser dari ranah diplomatik ke ranah keamanan nasional.

Perubahan pendekatan yang lebih tegas terjadi pada masa pemerintahan Bongbong Marcos. Sejak menjabat pada tahun 2022, Marcos mulai mengevaluasi ulang keterlibatan Filipina dalam proyek MSR, khususnya akibat meningkatnya insiden maritim yang melibatkan CCG. Pemerintah secara aktif mengajukan protes diplomatik terhadap China dan meningkatkan frekuensi patroli militer di wilayah yang disengketakan. Retorika pemerintah pun berubah: dari narasi kerja sama ekonomi menjadi wacana perlindungan wilayah dan pertahanan maritim. Proses ini mencerminkan keberhasilan *sekuritisasi*, di mana isu yang awalnya dianggap teknis atau ekonomis bertransformasi menjadi isu eksistensial yang menuntut kebijakan luar biasa (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

Marcos juga memperkuat hubungan keamanan dengan Amerika Serikat dan Jepang, sebagai bagian dari strategi penyeimbangan terhadap pengaruh China. Kesepakatan perluasan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) dan latihan militer gabungan menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Filipina telah kembali pada pola yang lebih konfrontatif dan berbasis aliansi. Langkah-langkah ini tidak hanya merupakan respons taktis, tetapi juga bagian dari re-artikulasi identitas negara sebagai pemangku kepentingan regional yang otonom dan defensif.

Temuan lain menunjukkan bahwa *sekuritisasi* terhadap proyek MSR juga diperkuat oleh komunitas epistemik dan

media lokal. Laporan investigatif, analisis akademik, serta editorial media mulai menyoroti potensi “jebakan utang,” penggunaan pelabuhan strategis untuk keperluan militer, dan keterkaitan antara proyek MSR dengan pelanggaran batas laut. Artikulasi ini menciptakan konsensus di kalangan audiens domestik bahwa keterlibatan Filipina dalam MSR bukan lagi isu pembangunan, tetapi menyangkut integritas wilayah nasional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyek MSR telah memicu reaksi *sekuritisasi* berlapis di Filipina. Reaksi ini tidak hanya dipicu oleh tindakan fisik China di Laut China Selatan, tetapi juga oleh persepsi bahwa kerja sama ekonomi yang tidak simetris dapat digunakan sebagai alat ekspansi pengaruh. Proses ini telah mengubah postur kebijakan luar negeri Filipina dari yang semula akomodatif menjadi lebih waspada dan defensif, terutama dalam konteks keamanan maritim dan kedaulatan wilayah.

KESIMPULAN

Maritime Silk Road (MSR) merupakan strategi China yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan maritim Filipina. Meskipun memberikan manfaat ekonomi, proyek ini juga meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan dan memperumit hubungan diplomatik antara kedua negara. MSR tidak hanya berfungsi sebagai proyek ekonomi China, tetapi juga sebagai alat ekspansi geopolitik yang terstruktur untuk memperkuat pengaruhnya di Laut China Selatan, termasuk terhadap Filipina. Melalui investasi dalam infrastruktur maritim, seperti pelabuhan strategis dan jalur perdagangan, serta dukungan finansial terhadap proyek pembangunan, China secara bertahap membangun

posisi dominannya di wilayah yang disengketakan.

Selain itu, *China Coast Guard (CCG)* dan milisi maritim semakin aktif melakukan patroli dan intervensi terhadap kapal-kapal Filipina, memperlihatkan bagaimana MSR juga digunakan sebagai instrumen *sekuritisasi*. Kehadiran fisik yang intensif tersebut memperkuat persepsi ancaman di tingkat domestik, yang mendorong aktor-aktor politik dan keamanan Filipina untuk merekonstruksi kerja sama ekonomi sebagai isu keamanan nasional.

Bagi Filipina, keterlibatan dalam MSR telah menimbulkan dilema geopolitik. Di era Rodrigo Duterte (2016–2022), Filipina lebih terbuka terhadap investasi China dengan harapan mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun, meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, terutama insiden penggunaan laser militer oleh CCG terhadap kapal Filipina pada tahun 2023, membuat pemerintahan Bongbong Marcos (2022–2023) mengubah arah kebijakan luar negerinya dan mulai mempertegas posisi dalam sengketa wilayah maritim. Selama satu tahun pertama masa pemerintahan Marcos, Filipina mulai meninjau kembali keterlibatannya dalam MSR, menyadari bahwa ketergantungan pada investasi China tidak menjamin keamanan maritimnya.

Perubahan ini ditunjukkan melalui peningkatan frekuensi patroli maritim, pengajuan nota diplomatik terhadap tindakan provokatif China, serta penguatan hubungan pertahanan dengan sekutu seperti Amerika Serikat dan Jepang. Arah kebijakan ini menandai transisi dari pendekatan akomodatif ke posisi yang lebih defensif dan strategis dalam menghadapi ancaman eksternal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa MSR bukan sekadar proyek pembangunan ekonomi, melainkan telah menjadi isu yang disekuritisasi dalam konteks kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Filipina. Proses *sekuritisasi* ini terjadi sebagai respons terhadap perubahan konstelasi geopolitik, kehadiran maritim China, serta narasi politik dalam negeri yang semakin kritis terhadap pengaruh eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buzan, B. (2007). *People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-Cold War era*. ECPR Press.

Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. Public Affairs.

Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by other means: Geoeconomics and statecraft*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674545960>

Jurnal Ilmiah

Banlaoi, R. C. (2014). China's current naval strategy and the South China Sea disputes: Maritime security dilemma in Philippines-China relations. *MSR*, 1, 75–92.
<https://journals.ateneo.edu/ojs/cspls/article/download/2004/1997>

Chung, C. (2017). What are the strategic and economic implications for South Asia of China's Maritime Silk Road initiative? *The Pacific Review*, 31(3), 315–332.

<https://doi.org/10.1080/09512748.2017.1375000>

De Castro, R. C. (2019). China's Belt and Road Initiative (BRI) and the Duterte administration's appeasement policy: Examining the connection between the two national strategies. *East Asia*, 36(3), 205–227.
<https://doi.org/10.1007/s12140-019-09315-9>

Duran, N. J. (2023). Geopolitical luck or crisis?: Communicating China's Belt and Road Initiative amidst South China Sea dispute. *Journal of Advanced Zoology*, 44(3), 1043–1052.
<https://doi.org/10.17762/jaz.v44i3.1311>

Farras, A. N. (2023). Hubungan interdependensi Indonesia–China di tengah ketegangan Laut Natuna Utara. *IP (Indonesian Perspective)*, 8(1), 96–120.
<https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56381>

Hoque, M. M., & Tama, R. A. Z. (2020). China's Belt and Road Initiative: Global politics and implications. *European Scientific Journal*, 16(31), 279.
<https://doi.org/10.19044/esj.2020.v16n31p279>

Johnston, L. A. (2018). The Belt and Road Initiative: What is in it for China? *Asia & the Pacific Policy Studies*, 6(1), 40–58.
<https://doi.org/10.1002/app5.265>

Jose, H. S. (2021). Preservation of the ASEAN regionalism: Responding to the Belt Road Initiative as the new 'carrot or stick' policies. *HAPSc Policy Briefs Series*, 2(1), 143.
<https://doi.org/10.12681/hapscpbs.27670>

- Khan, M. Z., & Altaf, Z. (2022). China's foreign policy shift from Belt and Road Initiative to Global Development Initiative: Impacts on maritime geopolitics of the Indian Ocean region. *Margalla Papers*, 26(2), 14–27. <https://doi.org/10.54690/margallapers.26.2.119>
- Li, C., Zhang, L., Zhang, T., & Wang, T. (2024). Has the Maritime Silk Road Initiative promoted the development and expansion of port city clusters along its route? *Cities*. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105127>
- Mahendra, Y. I., Ramadhoan, R. I., & Suhermanto, D. F. (2023). Pengaruh kebijakan Belt and Road Initiative China terhadap stabilitas sub-kompleks keamanan Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (Jihi)*, 19(2), 156–174. <https://doi.org/10.26593/jihi.v19i2.5788.156-174>
- Malik, J. M. (2017). Myanmar's role in China's Maritime Silk Road Initiative. *Journal of Contemporary China*, 27(111), 362–378. <https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1410969>
- Vu, K. M. (2020). Navigating the South China Sea dispute: Vietnam's hedging strategy. *Contemporary Southeast Asia*, 42(2), 233–257. <https://doi.org/10.1355/cs42-2c>

Laporan dan Sumber Pemerintah

- Hurley, J., Morris, S., & Portelance, G. (2018). *Examining the debt implications of the Belt and Road Initiative from a policy perspective* (CGD Policy Paper No. 121). Center for Global Development.

<https://www.cgdev.org/publication/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-perspective>

Berita dan Sumber Online

- Clark, J. (2023, December 11). DOD officials underscore “ironclad” commitment to Philippines after China's unsafe maneuvers. *DOD News*. <https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3613695>
- Heijmans, H. (2022, December 20). China accused of building on unoccupied reefs in South China Sea. *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-20/china-accused-of-building-on-unoccupied-reefs-in-south-china-sea>
- Heydarian, R. J. (2024, August 30). South China Sea: Philippines hedges its bets between U.S. and China. *China-US Focus*. <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/south-china-sea-philippines-hedges-its-bets-between-us-and-china>
- The Belt and Road Initiative, The ASEAN perspective. (n.d.). *JSTOR*. <https://www.jstor.org/stable/resrep28672>